

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Anandya, Diky, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana, 2021, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi I 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan Muladi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Butt, Simon dan Tim Lindsey, 2018, *Indonesian Law*, Oxford University Press, United Kingdom.

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Press, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emprisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Garner, Bryan A., 2010, *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition*, West Publisching, America

Hamzah Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1991, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Herdiansyah, 2021, *Politik Tanpa Korupsi*, Racikata, Cirebon.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy. O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Indonesia Corruption Watch, 2022, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Indonesia Corruption Watch. 2022, *Laporan Penelitian Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

International, Transparency, 2022, *Corruption Perception Index 2021*, Transparency International Secretariat, Jerman.

Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok.

Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung.

- \_\_\_\_\_ dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud, Ade, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan Peradilan, Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Jakarta.
- Panggabean, H.P., 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori, Praktek, dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, Ramelan, dan Surastini Fitriasih, 2010, *Kajian tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transtaional Organized Crime dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Priyono, Herry B., 2018, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Projodikoro, Wiryono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sadono, Warih, 2019, *Cara Luar Biasa Pemberantasan Korupsi: Pemberantasan Korupsi Melalui Pengampunan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, Suluh Media, Yogyakarta.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Balai Aksara, Jakarta.

Saleh, K. Wantjik, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sholehuddin, M., 2007, *Sistem Sanksi dalam hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supardi, 2018, *Perampasan Aset Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Kencana, Jakarta.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Wiyono, R, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusni, Muhammad, 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Artikel Jurnal**

Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 1, Januari – Maret 2015.

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Balanda, Haris AP, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Perbarengan Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 6, Juni 2019.

Chandra, Tofik Yanuar dan Indik Rusmono, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2020.

Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.

Fahrurrozi dan AR Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2018.

Hiariej, Eddy O.S., "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, 2019.

Kamea, Henny C., "Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2013.

Karoba, Maikel, "Sistem Pembuktian dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Volume 8, Nomor 9, September 2019.

Mahkamah Agung, “Kebijakan peradilan, Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar September 2007”, *Varia Peradilan*, Nomor 263, Oktober 2007.

Mahmud, Ade, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49, Nomor 3, Juli 2020.

Munirah, Intan, Mohd. Din, dan Efendi, “Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 2, Agustus 2017.

Rachmawati, Amalia Fadhila, “Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Eksaminasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2021.

Ramiyanto, “Penghapusan Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Criminal Penalty Abolition on Corruption Case in Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Salmi, Akhiar, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu, Kini, dan Masa Datang”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FH UI*, 2009.

Sanusi, H.M. Arsyad, “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009.

Supriyadi dan Widodo Eddyono, “Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 7, Nomor 4, Mei 2010.

Triyanto, Gatot, “Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechtsens*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2017.

Widyastuty, Rizky, “Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Lex Crimen*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2019.

### **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Candra, Fransisca Fitriani Riani, 2017, “Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup dengan Kumulasi Pidana Denda dalam Tindak Pidana

Narkotika”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ramadhan, Febri, 2019, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Robertson, 2021, “Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) Untuk Memulihkan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sitompoel, Hotma P.D., “Pelaksanaan Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Usman, Endang, “Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Upaya Mewujudkan Pengembalian Aset Perolehan Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

#### **D. Makalah/Pidato**

Alkostar, Artidjo, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime”, *Makalah*, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 18-21 November 2013.

Arief, Barda Nawawi, “Efektivitas Pidana Penjara”, *Makalah*, Seminar Nasional Tentang Pemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Juli 1995.

#### **E. Internet**

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-gagas-sita-jaminan-untuk-perkara-korupsi-lt51d5853ccc40b?page=1>, diakses 16 Juni 2022.

JDIH BPK, [file:///C:/Users/w7/Downloads/UangPengganti%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/w7/Downloads/UangPengganti%20(1).pdf), diakses 14 Juni 2022.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses 9 Februari 2022.



KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ratio>, diakses 6 Mei 2022.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformulasi>, diakses 6 Mei 2022.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subsider>, diakses 9 Februari 2022.

Sekretariat Jenderal DPR RI,  
[http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20220118-033639-1151.pdf](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20220118-033639-1151.pdf), diakses 22 April 2022.

Sekretariat Jenderal DPR RI,  
[http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20220118-033704-2247.pdf](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20220118-033704-2247.pdf), diakses 24 April 2022.

Sekretariat Jenderal DPR RI,  
[http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20200616-075152-2890.pdf](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200616-075152-2890.pdf), diakses 9 Juni 2022.

## **F. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041).



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

#### **G. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1982/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 atas nama Terdakwa Brigjen Teddy Hernayadi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2190K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Fathor Rasjid.